

Pagar Laut Dibangun Sejak Era Jokowi, Tunjukkan Lemahnya Pengawasan Pemerintah

Category: Nasional, News

written by Redaksi | 18/01/2025



ORINews.id – Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menilai keberadaan pagar laut di kawasan PIK 2 di pesisir Tangerang Banten, dan di Bekasi, Jawa Barat hingga Jakarta Utara, mencerminkan lemahnya pengawasan, baik dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) maupun pemerintah daerah.

“Pagar-pagar ini memang dibangun sejak era pemerintahan sebelumnya ([Jokowi](#)) dan dibiarkan berkembang. Pagar-pagar ini beberapa muncul akibat ketakutan akan pembatalan izin,” ujar Trubus di Jakarta, Sabtu (18/1/2025).

Ia menegaskan, keberadaan pagar laut itu jelas merugikan para nelayan yang beroperasi di sekitar kawasan tersebut.

Di sisi lain, Trubus juga menyoroti kerusakan ekosistem terumbu karang yang menjadi tempat hidup ikan akibat pembangunan pagar dari bambu itu.

Kendati sejumlah pihak menyatakan bahwa pembangunan pagar laut ini sudah melalui proses analisis mengenai dampak lingkungan

(AMDAL), Trubus mengkritisi implementasinya yang tidak berjalan sesuai rencana.

“Pemerintah lebih fokus pada aspek pajak dan retribusi, sementara persoalan lingkungan dan kesejahteraan nelayan kurang mendapatkan perhatian,” kata Trubus.

Dia pun mengapresiasi langkah pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menyegel lokasi pagar dan memastikan tidak ada kelanjutan pembangunan dari pagar laut itu.

Namun, menurutnya, langkah yang diambil masih bersifat jangka pendek. Dia mendesak ada solusi efektif, termasuk sanksi bagi pihak yang membangun pagar laut tersebut.

“Solusi jangka panjangnya harus jelas, yakni menghentikan aktivitas pembangunan pagar-pegar tersebut dan memberikan sanksi kepada pembuatnya,” terangnya.

Trubus juga mendorong pemerintah dapat menyeimbangkan kepentingan bisnis dengan keberlangsungan ekosistem dan ekonomi masyarakat pesisir. Terlebih, kebijakan pembangunan berbasis lingkungan saat ini menjadi salah satu prioritas di tengah kondisi perubahan iklim.

“Kebijakan yang diambil harus berpihak pada masyarakat nelayan dan lingkungan, bukan pada kepentingan bisnis yang rentan menyebabkan pelanggaran,” ujarnya.

Dia berharap pemerintah bisa lebih fokus pada kebijakan yang mendukung keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan nelayan agar pembangunan kelautan di Indonesia dapat berjalan secara berkelanjutan dan menguntungkan bagi seluruh pihak.